

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

Rapat ke	: 31 (tiga puluh satu)
Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Pertahanan (Menhan), dan Menteri Luar Negeri (Menlu))
Hari, Tanggal	: Senin, 13 Juli 2020
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: 1. Dibuka oleh Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI 2. Dilanjutkan dan ditutup oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>), dengan agenda: 1. <u>Sesi I, yaitu Pembahasan:</u> a. Pembukaan b. Keterangan/Penjelasan Pemerintah c. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi d. Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi e. Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan 2. <u>Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:</u> a. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan

- b. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
 - c. Pendapat Akhir Pemerintah
 - d. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan
 - e. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
 - f. Penutup
- Hadir : 1. orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI
- 2. a. Menkumham, Yasonna H. Laoly;
 - b. Menhan diwakili oleh Wakil Menhan, Sakti Wahyu Trenggono;
 - c. Menlu, diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A.; beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.46 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkumham, Menhan, dan Menlu) secara tatap muka pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI dan dilanjutkan serta ditutup oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan keterangan/penjelasan Pemerintah dan dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, serta jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*).
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.38 WIB.

1. MENKUMHAM

YASONNA H. LAOLY

2. WAMENHAN

SAKTI WAHYU TRENGGONO

3. DIRJEN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Dr. iur. DAMOS DUMOLI AGUSMAN, S.H., M.A

Jakarta, 13 Juli 2020
KETUA RAPAT,

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-442



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 13 JULI 2020**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)	DISETUJUI TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>) Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DISETUJUI TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p> <p align="center">DISETUJUI TETAP</p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;</p>	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p> <p align="center">DISETUJUI TETAP</p>
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>) pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia;</p>	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>) pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia;</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p> <p align="center">DISETUJUI TETAP</p>
5.	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p>	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p> <p align="center">DISETUJUI TETAP</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
7.	<p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
8.	<p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
9.	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Dengan Persetujuan Bersama</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
10.	<p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
11.	<p>Pasal 1</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Pasal 1</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
12.	<p>(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia.</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
13.	<p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
15.		<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
16.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...	DISETUJUI TETAP

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIC INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIC INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
17.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 13 JULI 2020**

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN</i>	DISETUJUI TETAP RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</i>	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>) Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020
2.	I. UMUM	DISETUJUI TETAP I. UMUM Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020
3.	Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	DISETUJUI TETAP Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020
4.	Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.	DISETUJUI TETAP Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
5.	<p> KERJA sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</p> <p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p>Catatan: Setelah kata “Indonesia” ditambahkan tanda baca “,”</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
6.	<p>Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan antara lain:</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p>Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan antara lain:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
7.	<p>1. Bidang kerja sama Persetujuan mencakup:</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p>1. Bidang kerja sama Persetujuan mencakup:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
8.	<p>a. pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p>a. pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
9.	<p>b. pengembangan kerja sama militer-teknis;</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>b. pengembangan kerja sama militer-teknis;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
10.	c. pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>c. pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
11.	d. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>d. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
12.	e. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>e. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
13.	f. pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>f. pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
14.	g. meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak; dan	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>g. meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak; dan</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
15.	h. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.	<p>DISETUJUI TETAP</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>h. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
16.	2. Pelindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam pelaksanaan Persetujuan.	<p>DISETUJUI PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</p> <p>2. Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam pelaksanaan Persetujuan.</p> <p>Catatan: Kata “Pelindungan” diganti dengan kata “Perlindungan”</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
17.	3. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.	<p>DISETUJUI PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</p> <p>3. Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.</p> <p>Catatan: Kata “Pelindungan” diganti dengan kata “Perlindungan”</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
18.	4. Otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan.	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>4. Otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
19.	5. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak, kecuali ditentukan lain.	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>5. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak, kecuali ditentukan lain.</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
20.	6. Penyelesaian perselisihan pelaksanaan Persetujuan melalui negosiasi bilateral dan konsultasi antara Para Pihak serta melalui saluran diplomatik.	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p>6. Penyelesaian perselisihan pelaksanaan Persetujuan melalui negosiasi bilateral dan konsultasi antara Para Pihak serta melalui saluran diplomatik.</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
21.	7. Ketentuan mengenai amandemen, mulai berlaku, dan berakhirnya Persetujuan.	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p>7. Ketentuan mengenai amandemen, mulai berlaku, dan berakhirnya Persetujuan.</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
22.	II. PASAL DEMI PASAL	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
23.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
24.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020</p>
25.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Juli 2020